

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik politik identitas di Indonesia pada era reformasi mencerminkan dinamika baru dalam kehidupan sosial-politik pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Reformasi yang dimulai tahun 1998 membuka keran demokrasi dan kebebasan berekspresi, namun juga membawa tantangan berupa menguatnya politik identitas. Politik identitas pada masa ini ditandai dengan Meningkatnya penggunaan agama, etnis, dan budaya sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan atau legitimasi. Maraknya polarisasi politik, terutama melalui media sosial yang menjadi alat efektif menyebarkan narasi identitas. Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh nyata bagaimana agama dijadikan senjata politik yang memicu konflik sosial, membelah masyarakat, serta menurunkan toleransi antar kelompok. Dampak negatif yang muncul meliputi potensi perpecahan sosial, konflik horizontal, penurunan kualitas demokrasi, dan rusaknya hubungan antaragama/antarbudaya jika identitas dijadikan alat eksklusif untuk merebut kekuasaan. Dengan demikian, meskipun demokrasi pasca-reformasi memberi

ruang bagi ekspresi identitas, penyalahgunaan identitas dalam politik dapat mencederai persatuan bangsa.

Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar tidak menolak politik identitas, namun memandangnya secara selektif dan berprinsip. Pandangannya dapat diringkas sebagai berikut:

Politik identitas diperbolehkan asal Berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, moralitas, dan persatuan. Tidak menjadi alat untuk memecah belah masyarakat. Tidak menimbulkan fanatisme buta yang melanggar prinsip universal Islam. Buya Hamka menekankan bahwa seorang Muslim dalam berpolitik harus berpihak pada Islam, terutama jika ada partai atau calon pemimpin yang mewakili nilai-nilai Islam. Namun, jika tidak ada representasi yang jelas, umat Islam boleh memilih pihak yang paling dekat dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran dan keadilan. Kepemimpinan dalam Islam menurut Buya Hamka harus tetap berada di tangan orang-orang yang beriman dan amanah. Namun ia juga mengingatkan agar agama tidak dijadikan alat politik praktis. Kontekstualisasi tafsirnya menunjukkan bahwa politik identitas bisa memperkuat persatuan dan moral publik jika dilandasi iman dan etika Islam, bukan semata kepentingan kelompok.

B. Saran

Diperlukan upaya berkelanjutan untuk menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang mengedepankan nilai persatuan dan kemanusiaan dalam kehidupan berpolitik. Para akademisi, tokoh agama, dan pendidik dapat mengambil peran strategis dalam menyebarluaskan tafsir yang moderat dan kontekstual agar masyarakat tidak terjebak dalam politik identitas yang sempit. Literasi politik yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin perlu ditanamkan sejak dini agar tercipta ruang politik yang sehat, adil, dan berkeadaban dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

